



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT No. 3 JAKARTA PUSAT 10110

TELEPON. 3459444 (HUNTING), FAKSIMILE. 3453289, 3843768

WEBSITE : <http://www.menkokesra.go.id> e-mail : Informasi@menkokesra.go.id

Nomor : 44 /UND/DEP.IV/I/2015

Jakarta, 20 Januari 2014

Lamp. : 1 (satu) lembar

Hal : Rapat Koordinasi mengenai Program Sertifikasi
Rumah Ibadah, Pondok Pesantren, Panti Sosial, dan Cagar Budaya
Oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Kepada Yth.

Mohon Periksa Lampiran

Di

Jakarta.

Berdasarkan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 33/020/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 perihal tersebut di atas, maka dalam rangka persiapan program tersebut dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 22 Januari 2015

Waktu : 10.00 - selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 5 Kemenko PMK

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat

Pimpinan Rapat : Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama

Mengingat pentingnya agenda acara dimaksud, dimohon dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu dan hasil rapat koordinasi akan ditindaklanjuti pada rapat koordinasi tingkat Menteri pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Ibu Menko PMK (sebagai laporan);
2. Sekretaris Kemenko PMK.

Lampiran Undangan

Nomor : 44 /UND/DEP IV/I/2015

Hal : Rapat Koordinasi mengenai Persiapan Sertifikasi
Rumah Ibadah, Pondok Pesantren, Panti Sosial, dan Cagar Budaya
Oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama
3. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial
4. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
7. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
9. Deputi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
10. Deputi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan